



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
PERJALANAN DINAS DAN KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu melakukan penataan kembali ketentuan perjalanan dinas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementrian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DAN KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk kepentingan daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula atas perintah pejabat yang berwenang.
9. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dari Daerah menuju Negara lain dan kembali ke Daerah.
10. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dari Daerah menuju Ibu Kota Negara atau Provinsi atau Kabupaten/Kota di Luar Daerah dan kembali ke Daerah.
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan semula ke tempat tujuan dan kembali ke Daerah dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
13. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Surat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan SPD.
14. Tempat Kedudukan adalah tempat/Kota Kantor/Satuan Kerja berada.
15. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
16. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
17. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas meliputi :

- a. perjalanan Dinas Luar Negeri;
- b. perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- c. perjalanan Dinas Jabatan; dan/atau
- d. perjalanan Dinas Pindah.



Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a hanya dilaksanakan atas dasar perencanaan yang matang untuk hal – hal yang sangat penting dan harus dibatasi.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan setelah mendapat izin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua/Anggota DPRD dan atau Pejabat/Pegawai lainnya.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Bupati dan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur untuk keberangkatan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua/Anggota DPRD dan atau Pejabat Eselon II kebawah dan Pegawai lainnya di Daerah.

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Perjalanan Dinas yang dilakukan lebih dari 3 (tiga) hari , dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (5) Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi hanya boleh dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat eselon IV, kecuali yang sifatnya membutuhkan tenaga operator, konsultasi yang berkaitan dengan aplikasi dapat dilakukan oleh staf dan/atau Pegawai Negeri Sipil lainnya.
- (6) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Rapat-rapat Koordinasi, Sosialisasi dan yang sejenis dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan/atau surat undangan penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
- (7) Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD hanya untuk perjalanan dinas yang mendukung kegiatan alat-alat kelengkapan dewan.

- (8) Perjalanan Dinas di luar hari kerja atau hari libur dapat dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lainnya dalam rangka melakukan tugas yang penyelenggaraannya berkenaan dengan hari libur atau diluar hari kerja dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal.
- (9) Perjalanan Dinas dengan alasan khusus sehingga mengakibatkan harus dilaksanakan melebihi tanggal yang telah tercantum dalam Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pemberi perintah perjalanan dinas dengan menerbitkan kembali Surat Tugas untuk tambahan hari pelaksanaan serta didukung Nota Dinas yang menjelaskan alasan penambahan waktu pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh :

- a. Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pelatihan, kursus, bimbingan teknis dan atau sejenisnya dengan kontribusi dan atau yang ditanggung akomodasi dan konsumsi oleh pihak penyelenggara, maka hanya diberikan uang saku selama mengikuti kegiatan dimaksud atau disesuaikan dengan surat dari pihak panitia penyelenggara.
- b. Pejabat fungsional/Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat dalam rangka melakukan pemeriksaan, Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap pada OPD yang mengelola pendapatan daerah dalam rangka uji petik dan perampungan pajak dan retribusi daerah adalah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari.
- c. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas khusus dapat dilakukan setelah menyampaikan kajian teknis dan mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah termasuk Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.

Pasal 6

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c termasuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam hal :

- a. ditugaskerjakan diluar tempat kedudukan;



Pasal 9

Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih dengan mencantumkan daftar pengikut.

Pasal 10

Bentuk Formulir ST dan SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) dan Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas adalah :
 - a. Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Tokoh Masyarakat dan Anggota Masyarakat, dalam hal sebagai utusan Daerah dalam lomba dan/atau Promosi Daerah; dan/atau
 - d. Pegawai Tidak Tetap yang sifatnya teknis.
- (2) Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disamakan dengan ketentuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sesuai dengan besaran lumpsum staf (Non Eselon).

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani permohonan ST dan SPD adalah kepala OPD dengan membuat Nota Dinas yang merincikan Latar belakang, maksud dan tujuan, pelaksana perjalanan dinas serta manfaat hasil perjalanan dinas tersebut bagi Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPD terhadap Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah :
 - a. Bupati terhadap yang melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
 - b. Bupati terhadap Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati di Dalam Negeri;

- c. Bupati terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Assisten, Staf Ahli, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
 - d. Wakil Bupati terhadap Perjalanan Dinas Wakil Bupati di Dalam Negeri apabila Bupati berhalangan;
 - e. Wakil Bupati terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Assisten, Staf Ahli, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, apabila Bupati berhalangan;
 - f. Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan/atau Wakil Bupati terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati berhalangan;
 - g. Ketua DPRD menandatangani ST dan Sekretaris DPRD menandatangani SPD terhadap Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Wakil Ketua DPRD menandatangani ST dan Sekretaris DPRD menandatangani SPD terhadap Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan;
 - i. Sekretaris Daerah terhadap Perjalanan Dinas Eselon III selain Kepala OPD, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil (Staf/Non Eselon) dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, Tokoh/Anggota Masyarakat.
 - j. Dalam hal mengundang Narasumber/Tenaga Ahli/Penceramah atau sebutan lainnya maka ST ditandatangani oleh pejabat dari instansi yang diundang sedangkan SPD ditandatangani oleh pejabat di daerah dengan terlebih dahulu membuat surat permohonan secara terperinci kepada lembaga/instansi/badan yang dengan mencantumkan sumber pendanaan kegiatan tersebut.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPD terhadap Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah :
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat bagi pejabat Eselon II ke bawah, Pegawai Negeri Sipil (Staf/Non Eselon) dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 3 (tiga) hari;
 - b. Inspektur Kabupaten Lombok Barat bagi Pejabat Fungsional Auditor dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Perjalanan Dinas

Dalam Daerah dalam rangka pemeriksaan reguler, monitoring dan evaluasi dan/atau yang sejenis.

- c. Kepala OPD bagi Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah paling lama 3 (tiga) hari.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola masing – masing OPD.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kode rekening Anggaran Perjalanan Dinas.
- (3) Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selektif dan terencana sehingga kebutuhan dalam 1 (satu) tahun dapat terpenuhi sesuai dengan sasaran dan tujuannya.

Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. biaya transport;
 - b. uang harian;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan;
 - b. biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar secara *lumpsum*;
 - c. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - d. biaya kelebihan bagasi pada maskapai penerbangan dapat dibayarkan khusus untuk barang milik Daerah yang digunakan dalam

mendukung pelaksanaan perjalanan dinas, Dokumen Daerah dan/atau Dokumen Negara serta bukan merupakan barang milik pribadi yang dibuktikan dengan foto dokumentasi.

- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. uang saku;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang makan.
- (4) Dalam hal pemberian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan SPD yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara kegiatan, maka komponen yang dapat dibayarkan adalah yang tidak tercantum dalam surat undangan dari Panitia penyelenggara tersebut;
 - b. pelaksanaan SPD yang disertai dengan biaya kontribusi penyelenggaraan, maka diberikan uang harian sebesar 50%;
 - c. pelaksanaan SPD untuk biaya perjalanan dinas luar negeri yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara dan/atau membayar biaya kontribusi, maka hanya diberikan uang harian sebesar 50%;
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar secara *lumpsum*.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II yang diberikan hanya satu kali setiap melakukan Perjalanan Dinas.
- (8) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

- (9) Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak
- (10) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Pasal 15

Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf a, meliputi :

a. Transportasi Udara :

1. Perjalanan Dinas Luar Negeri;
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
3. Perjalanan Dinas ke Kabupaten/Kota se Pulau Sumbawa bagi :
 - a) Bupati, Wakil Bupati atau Pejabat yang mewakili Bupati, Wakil Bupati dan Pengikutnya;
 - b) Pimpinan dan Anggota DPRD dan pengikutnya;
 - c) Sekretaris Daerah dan pengikutnya;
 - d) Pejabat Eselon II dan Kepala OPD; dan
 - e) Pejabat Eselon III dan Esselon IV

b. Transportasi Darat bagi Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh selain sebagaimana dimaksud huruf a.

Pasal 16

- (1) Besarnya Biaya Transportasi Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari kelas bisnis dan kelas ekonomi.
- (2) Kelas bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III (tiga) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Besarnya Biaya Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran IV (empat) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Besarnya biaya transportasi darat ke Pulau Sumbawa dan ke Pulau Bali dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya penyeberangan dan biaya bahan bakar minyak untuk setiap kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran V (lima) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (5) Besarnya Biaya Transportasi Udara dan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran VI (enam) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. biaya transport/tiket dibayarkan sesuai dengan biaya riil pada saat melakukan perjalanan dinas;
 - b. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
 - d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil, kecuali taksi menuju bandara dan taksi dari bandara ke tempat tujuan pergi dan pulang;
 - f. biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Komponen Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran VII (tujuh) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Bagi Pejabat yang karena jabatannya harus melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah setiap bulan, kepadanya diberikan Tunjangan Perjalanan Tetap.
- (2) Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Besarnya Tunjangan Perjalanan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII (delapan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 19

Dilarang membayar rangkap biaya Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh orang yang sama dan dalam waktu yang sama.

Pasal 20

- (1) Setiap Pejabat, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas, wajib menyampaikan:
- a. tiket Pesawat (harga riil pada saat melakukan perjalanan dinas) dan pass naik (boarding pas) dari tempat kedudukan ke tempat bertolak untuk menuju ketempat tujuan pergi dan pulang, sesuai kategori/tingkatan perjalanan dinas yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya transportasi dari dan/atau menuju bandara;
 - c. tiket bus dan/atau tiket penyeberangan, pergi dan pulang;
 - d. biaya hotel/penginapan riil;
 - e. biaya sewa kendaraan/moda transportasi;
 - f. daftar pernyataan pengeluaran untuk biaya yang tidak memungkinkan untuk menyediakan bukti pembayaran riil dengan membuat surat pernyataan pengeluaran riil;
 - g. surat tugas (ST);
 - h. surat perjalanan dinas (SPD) yang ditandatangani pejabat yang dituju;
 - i. kwitansi;
 - j. laporan perjalanan dinas disampaikan kepada pemberi Surat Tugas melalui kepala OPD paling lambat 6 (enam) hari setelah kembali melaksanakan perjalanan dinas dimana laporan harus menguraikan hasil perjalanan dinas secara terperinci berupa, saran dan tindak lanjut; dan
 - k. bagi yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan/atau luar negeri agar menyertakan dokumentasi atau foto perjalanan dinas tersebut.

- (2) Bentuk surat Daftar Pernyataan Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam lampiran IX (sembilan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jika terdapat perbedaan nama dalam bukti dokumen maka harus dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menerbitkan ST dan SPD, selambat-lambatnya 6 (enam) hari sesudah kembali.
- (4) Jika Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas telah ditandatangani, namun pelaksana perjalanan dinas tidak dapat melakukan perjalanan dinas yang diperintahkan, sementara biaya tiket perjalanan dinas telah dibayarkan, maka harus dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas sedangkan biaya tiket dapat diganti sebagian atau seluruhnya mengacu ketentuan yang berlaku dari maskapai penerbangan atau instansi yang berwenang atas pengeluaran tiket tersebut.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Peraturan ini dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah atau Pimpinan Satuan Kerja yang berwenang untuk itu melakukan pembinaan secara teknis administratif;
 - b. Inspektur Kabupaten berwenang melakukan pengawasan secara teknis fungsional.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

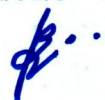
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 17 Februari 2020
BUPATI LOMBOK BARAT,



 H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 17 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT


H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR 11

Lampiran I : Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor : 11 Tahun 2020
Tentang : Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

CONTOH SURAT TUGAS



BUPATI LOMBOK BARAT

SURAT TUGAS

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor Tahun Tanggal tentang Biaya Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020, dengan ini menugaskan kepada :

1.(Pangkat/Golongan/Jabatan)
2.
3.
4.
5.

Tujuan :

Lamanya :

Uraian tugas :

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Gerung,.....

BUPATI LOMBOK BARAT,

.....


BUPATI LOMBOK BARAT,


H. FAUZAN KHALID

Lampiran II : Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor : 11 Tahun 2020
Tentang : Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

CONTOH SURAT PERJALANAN DINAS

Bagian Depan

|  BUPATI LOMBOK BARAT | | | |
|---|---|---------------------|------|
| <u>SURAT PERJALANAN DINAS</u> Nomor : | | | |
| 1. | Pejabat berwenang yang memberi perintah | BUPATI LOMBOK BARAT | |
| 2. | Nama Pegawai yang diperintah | | |
| 3. | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan | a. b. | |
| 4. | Maksud Perjalanan | | |
| 5. | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. b. | |
| 6. | a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali | a. b. c. | |
| 7. | Alat Angkutan yang dipergunakan | | |
| 8. | Pengikut | Nama | Umur |
| | 1. | | |
| | 2. | | |
| | 3. | | |
| 9. | Pembebanan Anggaran | | |
| | a. Instansi | | a. |
| | b. Mata Anggaran | | b. |
| 10. | Keterangan lain-lain | | |
| Dikeluarkan di : Pada tanggal : BUPATI LOMBOK BARAT | | | |

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Bagian Belakang

| | |
|--|--|
| Berangkat dari (tempat kedudukan) : Pada Tanggal : Ke : Kepala : | |
| (.....) | |
| I Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) | Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) |
| II Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) | Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) |
| III Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) | Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) |
| IV Tiba di : (tempat kedudukan) Pejabat yang memberikan perintah, (.....) | Telah diperiksa dengan keterangan tersebut di atas benar dilaksanakan atas perintahnya semata-mata untuk kepentingan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pejabat yang memberikan perintah, (.....) |
| PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-Peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya. | |

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Lampiran III : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor : 11 Tahun 2020

Tentang : Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

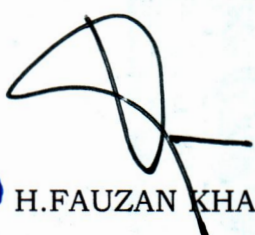
**BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DENGAN MENGGUNAKAN PESAWAT UDARA**

| NO | ROUTE | TARIF KELAS | | KET |
|----|-------------------------|----------------|-----------------|-----|
| | | BISNIS (PP) | EKONOMI (PP) | |
| 1 | Mataram - Denpasar | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 2 | Mataram - Surabaya | 2,800,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 3 | Mataram - Yogyakarta | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 4 | Mataram - Jakarta | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 5 | Mataram - Kupang | 4,800,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 6 | Mataram - Bima | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 7 | Mataram - Sumbawa | 1,600,000.00 | 800,000.00 | |
| 8 | Bima - Sumbawa | 1,600,000.00 | 800,000.00 | |
| 9 | Bima - Denpasar | 2,800,000.00 | 1,400,000.00 | |
| 10 | Sumbawa - Denpasar | 2,400,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 11 | Sumbawa - Surabaya | 3,600,000.00 | 1,800,000.00 | |
| 12 | Surabaya - Yogyakarta | 2,800,000.00 | 1,400,000.00 | |
| 13 | Surabaya - Semarang | 2,400,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 14 | Surabaya - Jakarta | 2,800,000.00 | 1,400,000.00 | |
| 15 | Surabaya - Makassar | 3,200,000.00 | 1,600,000.00 | |
| 16 | Surabaya - Palangkaraya | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 17 | Surabaya - Pontianak | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 18 | Surabaya - Manado | 5,000,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 19 | Surabaya - Ambon | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 20 | Surabaya - Balikpapan | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 21 | Surabaya - Bandung | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | |

4

| NO | RUTE | TARIF KELAS | | KET |
|----|--------------------------------|----------------|-----------------|-----|
| | | BISNIS (PP) | EKONOMI (PP) | |
| 22 | Surabaya - Kendari | 4,400,000.00 | 2,200,000.00 | |
| 23 | Surabaya - Banjarmasin | 3,000,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 24 | Surabaya - Kupang | 4,800,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 25 | Surabaya - Solo | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 26 | Jakarta - Medan | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 27 | Jakarta - Padang | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 28 | Jakarta - Pekanbaru | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 29 | Jakarta - Palembang | 3,400,000.00 | 1,700,000.00 | |
| 30 | Jakarta - Jambi | 3,800,000.00 | 1,900,000.00 | |
| 31 | Jakarta - Batam | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 32 | Jakarta - Bandung | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 33 | Jakarta - Banda Aceh Bandar | 8,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 34 | Jakarta - Lampung | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 35 | Jakarta - Bengkulu | 3,600,000.00 | 1,800,000.00 | |
| 36 | Jakarta - Solo | 3,400,000.00 | 1,700,000.00 | |
| 37 | Jakarta - Pontianak | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 38 | Jakarta - Palangkaraya | 4,600,000.00 | 2,300,000.00 | |
| 39 | Jakarta - Semarang | 3,000,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 40 | Denpasar - Jakarta | 5,000,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 41 | Denpasar - Makasar | 3,800,000.00 | 1,900,000.00 | |
| 42 | Denpasar - Yogyakarta | 3,300,000.00 | 1,650,000.00 | |
| 43 | Denpasar - Jayapura | 12,000,000.00 | 6,000,000.00 | |

BUPATI LOMBOK BARAT,

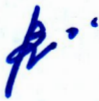

H. FAUZAN KHALID

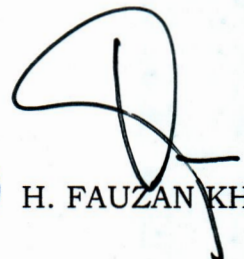

Lampiran IV : Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor : 11 Tahun 2020
Tentang : Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

**BIAYA PERJALANAN DINAS DENGAN MEMPERGUNAKAN
ANGKUTAN DARAT ATAU LAUT**

Biaya Perjalanan Dinas dengan mempergunakan Angkutan Darat atau Laut ditetapkan biaya transport sebagai berikut :

| | | |
|--|-----|-------------|
| a. Lombok Barat – Jakarta (PP) | Rp. | 1.300.000,- |
| b. Lombok Barat – Bandung (PP) | Rp. | 1.300.000,- |
| c. Lombok Barat – Semarang (PP) | Rp. | 1.100.000,- |
| d. Lombok Barat – Yogyakarta (PP) | Rp. | 1.100.000,- |
| e. Lombok Barat – Surabaya (PP) | Rp. | 700.000,- |
| f. Lombok Barat – Denpasar (PP) | Rp. | 500.000,- |
| g. Lombok Barat – Provinsi Lainnya (PP)..... | Rp. | 1.500.000,- |
| h. Lombok Barat – Sumbawa Barat (PP) | Rp. | 250.000,- |
| i. Lombok Barat – Sumbawa (PP) | Rp. | 300.000,- |
| j. Lombok Barat – Dompu (PP) | Rp. | 350.000,- |
| k. Lombok Barat – Bima (PP) | Rp. | 450.000,- |

BUPATI LOMBOK BARAT, 


 H. FAUZAN KHALID

Lampiran V : Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor : 11 Tahun 2020
Tentang : Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.


BIAYA PENYEBERANGAN DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS DAN
BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK


A. Biaya Penyeberangan

| NO | RUTE | TARIF (PP) | KETERANGAN |
|----|------------------------------|---------------|------------|
| 1. | Lombok Barat – Pulau Sumbawa | 1.500.000,- | |
| 2. | Lombok Barat – Pulau Bali | 2.000.000,- | |

B. Biaya Bahan Bakar Minyak (Premium, Pertamax, Pertalite)

| NO | RUTE | BBM (Liter) | KETERANGAN |
|----|------------------------------|----------------|---|
| 1. | Lombok Barat – Bali | 200 | Harga per liter sesuai penetapan Pemerintah |
| 2. | Lombok Barat – Bima | 200 | |
| 3. | Lombok Barat – Dompu | 150 | |
| 4. | Lombok Barat – Sumbawa | 125 | |
| 5. | Lombok Barat – Sumbawa Barat | 100 | |

BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID

Lampiran VI : Peraturan Bupati Lombok Barat
 Nomor : 11 Tahun 2020
 Tentang : Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

BIAYA PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

1. BIAYA TIKET (dalam US\$)

| NO. | NEGARA/KOTA | BIAYA TAHUN 2020 | |
|-----|----------------------------|------------------|---------------|
| | | KELAS BISNIS | KELAS EKONOMI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | I. AMERIKA UTARA | | |
| 1. | Chicago | 6.749 | 3.587 |
| 2. | Houston | 6.487 | 3.591 |
| 3. | Los Angeles | 5.809 | 3.178 |
| 4. | New York | 6.040 | 3.753 |
| 5. | Ottawa | 6.924 | 4.083 |
| 6. | San Fransisco | 6.623 | 2.771 |
| 7. | Toronto | 8.564 | 3.201 |
| 8. | Vancouver | 7.458 | 3.277 |
| 9. | Washington | 8.240 | 3.743 |
| | | | |
| | II. AMERIKA SELATAN | | |
| 10. | Bogota | 9.426 | 7.713 |
| 11. | Brazilia | 11.518 | 5.970 |
| 12. | Boenos Aires | 9.134 | 5.970 |
| 13. | Caracas | 10.399 | 5.130 |
| 14. | Paramaribo | 9.494 | 7.353 |
| 15. | Santiago de Chile | 15.539 | 8.900 |
| 16. | Quito | 16.269 | 12.127 |
| | | | |
| | III. AMERIKA TENGAH | | |
| 17. | Mexico City | 7.831 | 3.966 |
| 18. | Havana | 11.223 | 7.335 |
| 19. | Panama City | 14.389 | 13.570 |
| | | | |
| | IV. EROPA BARAT | | |
| 20. | Vienna | 4.177 | 3.357 |
| 21. | Brussels | 5.994 | 3.870 |
| 22. | Marseilles | 5.074 | 3.541 |
| 23. | Paris | 6.085 | 3.331 |
| 24. | Berlin | 6.126 | 3.959 |
| 25. | Bern | 6.056 | 4.355 |
| 26. | Bonn | 5.023 | 3.753 |
| 27. | Hamburg | 6.031 | 3.825 |
| 28. | Geneva | 5.370 | 4.333 |
| 29. | Amsterdam | 5.898 | 3.331 |
| | V. EROPA UTARA | | |
| | | | |
| 30. | Copenhagen | 4.920 | 3.730 |
| 31. | Helsinki | 5.931 | 3.681 |

| NO. | NEGARA/KOTA | BIAYA TAHUN 2020 | |
|-----|---------------------------|------------------|---------------|
| | | KELAS BISNIS | KELAS EKONOMI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32. | Stockholm | 5.506 | 3.433 |
| 33. | London | 5.446 | 4.153 |
| 34. | Oslo | 4.773 | 4.049 |
| | | | |
| | V. EROPA SELATAN | | |
| 35. | Sarajevo | 7.129 | 6.033 |
| 36. | Zagreb | 6.334 | 2.794 |
| 37. | Athens | 9.256 | 8.041 |
| 38. | Lisbon | 4.746 | 3.383 |
| 39. | Madrid | 4.767 | 3.631 |
| 40. | Rome | 4.774 | 3.851 |
| 41. | Beograd | 6.158 | 5.350 |
| | | | |
| | VI. EROPA TIMUR | | |
| 42. | Bratislava | 4.341 | 3.771 |
| 43. | Bucharest | 4.982 | 4.113 |
| 44. | Kiev | 6.029 | 5.193 |
| 45. | Moscow | 7.206 | 5.143 |
| 46. | Praque | 6.748 | 3.451 |
| 47. | Sofia | 6.346 | 3.612 |
| 48. | Warsaw | 5.052 | 3.447 |
| | | | |
| | VII. AFRIKA BARAT | | |
| 49. | Dakkar | 9.848 | 8.555 |
| 50. | Abuja | 7.848 | 6.818 |
| | | | |
| | VIII. AFRIKA TIMUR | | |
| 51. | Addis Ababa | 5.808 | 5.552 |
| 52. | Nairobi | 7.966 | 6.081 |
| 53. | Antananarive | 9.000 | 8.282 |
| 54. | Dar Es Salaam | 6.599 | 5.733 |
| 55. | Harare | 10.600 | 5.747 |
| | | | |
| | IX. AFRIKA SELATAN | | |
| 56. | Windhoek | 11.774 | 7.510 |
| 57. | Cape Town | 8.438 | 7.330 |
| 58. | Johannesburg | 8.524 | 6.275 |
| | | | |
| | X. AFRIKA UTARA | | |
| 59. | Algiers | 6.593 | 5.710 |
| 60. | Cairo | 6.414 | 4.037 |
| 61. | Khartoum | 4.507 | 3.915 |
| 62. | Rabbat | 7.721 | 5.665 |
| 63. | Tripoli | 5.706 | 4.975 |
| 64. | Tunisia | 4.958 | 4.175 |
| | | | |
| | XI. ASIA BARAT | | |
| 65. | Manama | 5.992 | 4.700 |
| 66. | Baghdad | 4.148 | 3.545 |
| 67. | Amman | 6.431 | 3.545 |

| NO. | NEGARA/KOTA | BIAYA TAHUN 2020 | |
|------|--------------------------|------------------|---------------|
| | | KELAS BISNIS | KELAS EKONOMI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 68. | Kuwait | 4.273 | 3.110 |
| 69. | Beirut | 4.490 | 3.730 |
| 70. | Doha | 3.639 | 2.745 |
| 71. | Damascus | 5.390 | 3.325 |
| 72. | Ankara | 6.643 | 3.581 |
| 73. | Abu Dhabi | 4.976 | 2.727 |
| 74. | Sanaa | 5.878 | 3.678 |
| 75. | Jeddah | 3.785 | 3.321 |
| 76. | Muscat | 5.156 | 3.727 |
| 77. | Riyadh | 3.510 | 3.000 |
| | | | |
| | XII. ASIA TENGAH | | |
| 78. | Tashkent | 8.453 | 7.343 |
| 79. | Astana | 12.089 | 8.962 |
| | | | |
| | XIII. ASIA TIMUR | | |
| 80. | Beijing | 2.140 | 1.623 |
| 81. | Hongkong | 2.633 | 1.257 |
| 82. | Osaka | 2.686 | 1.864 |
| 83. | Tokyo | 2.675 | 1.835 |
| 84. | Pyongyang | 1.999 | 1.737 |
| 85. | Seoul | 2.966 | 1.737 |
| | | | |
| | XIV. ASIA SELATAN | | |
| 86. | Kaboul | 3.905 | 3.208 |
| 87. | Teheran | 3.416 | 2.920 |
| 88. | Colombo | 2.562 | 1.628 |
| 89. | Dhaka | 2.417 | 1.092 |
| 90. | Islamabad | 3.333 | 2.501 |
| 91. | Karachi | 3.633 | 2.321 |
| 92. | New Delhi | 2.009 | 1.673 |
| | | | |
| | XV. ASIA TENGGARA | | |
| 93. | Bandar Seri Begawan | 1.147 | 919 |
| 94. | Bangkok | 1.155 | 823 |
| 95. | Davao City | 2.558 | 1.641 |
| 96. | Hanoi | 1.833 | 1.656 |
| 97. | Ho Chi Minh | 1.503 | 1.235 |
| 98. | Johor Bahru | 911 | 525 |
| 99. | Kota Kinabalu | 1.427 | 694 |
| 100. | Kuala Lumpur | 659 | 585 |
| 101. | Manila | 1.614 | 1.150 |
| 102. | Penang | 766 | 545 |
| 103. | Pnom Penh | 1.981 | 1.627 |
| 104. | Singapore | 673 | 403 |
| 105. | Vientiane | 2.025 | 1.420 |
| 106. | Yangon | 1.212 | 1.053 |
| | | | |
| | XVI. ASIA PASIFIK | | |
| 107. | Canberra | 4.926 | 2.500 |

| NO. | NEGARA/KOTA | BIAYA TAHUN 2020 | |
|------|--------------|------------------|---------------|
| | | KELAS BISNIS | KELAS EKONOMI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 108. | Darwin | 4.900 | 3.964 |
| 109. | Melbourne | 3.814 | 2.858 |
| 110. | Noumea | 5.917 | 3.780 |
| 111. | Perth | 1.801 | 1.525 |
| 112. | Port Moresby | 7.398 | 5.034 |
| 113. | Sydney | 4.237 | 2.557 |
| 114. | Vanimo | 2.740 | 2.380 |
| 115. | Wellington | 4.687 | 3.413 |

2. Satuan Biaya uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (dalam US\$)

| NO. | NEGARA | SATUAN | GOLONGAN | | | |
|-----|----------------------------|--------|----------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bupati/ Wakil Bupati | DPRD/ Eselon II | Eselon III | Eselon IV/ Staf |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | I. AMERIKA UTARA | | | | | |
| 1. | Amerika Serikat | OH | 527 | 473 | 417 | 343 |
| 2. | Kanada | OH | 447 | 404 | 368 | 307 |
| | | | | | | |
| | II. AMERIKA SELATAN | | | | | |
| 3. | Argentina | OH | 395 | 277 | 242 | 241 |
| 4. | Venezuela | OH | 464 | 323 | 287 | 286 |
| 5. | Brazil | OH | 436 | 341 | 291 | 241 |
| 6. | Chile | OH | 415 | 316 | 270 | 222 |
| 7. | Columbia | OH | 386 | 281 | 240 | 221 |
| 8. | Peru | OH | 383 | 277 | 237 | 221 |
| 9. | Suriname | OH | 389 | 295 | 252 | 207 |
| 10. | Ekuador | OH | 385 | 273 | 242 | 241 |
| | | | | | | |
| | III. AMERIKA TENGAH | | | | | |
| 11. | Mexico | OH | 429 | 318 | 282 | 281 |
| 12. | Kuba | OH | 406 | 305 | 261 | 221 |
| 13. | Panama | OH | 414 | 307 | 272 | 271 |
| | | | | | | |
| | IV. EROPA BARAT | | | | | |
| 14. | Austria | OH | 504 | 453 | 318 | 317 |
| 15. | Belgia | OH | 466 | 419 | 282 | 281 |
| 16. | Perancis | OH | 512 | 464 | 382 | 381 |
| 17. | Rep.Federasi Jerman | OH | 443 | 411 | 282 | 281 |
| 18. | Belanda | OH | 463 | 416 | 272 | 271 |
| 19. | Swiss | OH | 509 | 456 | 322 | 321 |

9

| NO. | NEGARA | SATUAN | GOLONGAN | | | |
|-----|---------------------------|--------|----------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bupati/ Wakil Bupati | DPRD/ Eselon II | Eselon III | Eselon IV/ Staf |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20. | Denmark | OH | 472 | 427 | 275 | 241 |
| 21. | Irlandia | OH | 453 | 409 | 543 | 313 |
| 22. | Norwegia | OH | 517 | 465 | 288 | 286 |
| 23. | Swedia | OH | 466 | 436 | 342 | 341 |
| 24. | Kerajaan Inggris | OH | 587 | 534 | 432 | 431 |
| | | | | | | |
| | VI. EROPA SELATAN | | | | | |
| 25. | Bosnia Herzegovina | OH | 456 | 420 | 334 | 333 |
| 26. | Kroasia | OH | 483 | 444 | 353 | 352 |
| 27. | Spanyol | OH | 457 | 431 | 382 | 286 |
| 28. | Yunani | OH | 422 | 379 | 242 | 241 |
| 29. | Italia | OH | 520 | 472 | 372 | 371 |
| 30. | Portugal | OH | 425 | 382 | 242 | 241 |
| 31. | Serbia | OH | 401 | 361 | 313 | 277 |
| | | | | | | |
| | VII. EROPA TIMUR | | | | | |
| 32. | Bulgaria | OH | 406 | 367 | 320 | 284 |
| 33. | Czech | OH | 426 | 390 | 331 | 293 |
| 34. | Hongaria | OH | 421 | 381 | 339 | 300 |
| 35. | Polandia | OH | 401 | 361 | 313 | 277 |
| 36. | Rumania | OH | 416 | 381 | 313 | 277 |
| 37. | Rusia | OH | 556 | 512 | 407 | 406 |
| 38. | slovakia | OH | 429 | 387 | 335 | 297 |
| 39. | Ukraina | OH | 425 | 382 | 328 | 290 |
| | | | | | | |
| | VIII. AFRIKA BARAT | | | | | |
| 40. | Nigeria | OH | 361 | 313 | 292 | 291 |
| 41. | Senegal | OH | 334 | 276 | 206 | 201 |
| | | | | | | |
| | IX. AFRIKA TIMUR | | | | | |
| 42. | Ethiopia | OH | 312 | 257 | 192 | 167 |
| 43. | Kenya | OH | 334 | 276 | 206 | 196 |
| 44. | Madagaskar | OH | 296 | 244 | 182 | 181 |
| 45. | Tanzania | OH | 330 | 272 | 203 | 182 |
| 46. | Zimbabwe | OH | 285 | 244 | 216 | 215 |
| 47. | Mozambique | OH | 319 | 263 | 212 | 211 |
| | | | | | | |
| | X. AFRIKA SELATAN | | | | | |
| 48. | Namibia | OH | 300 | 247 | 185 | 161 |
| 49. | Afrika Selatan | OH | 304 | 251 | 202 | 201 |
| | | | | | | |

| NO. | NEGARA | SATUAN | GOLONGAN | | | |
|-----|-------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bupati/ Wakil Bupati | DPRD/ Eselon II | Eselon III | Eselon IV/ Staf |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | XI. AFRIKA UTARA | | | | | |
| 50. | Aljazair | OH | 342 | 308 | 287 | 286 |
| 51. | Mesir | OH | 368 | 273 | 212 | 190 |
| 52. | Maroko | OH | 304 | 251 | 192 | 191 |
| 53. | Tunisia | OH | 293 | 241 | 187 | 186 |
| 54. | Sudan | OH | 342 | 282 | 210 | 184 |
| 55. | Libya | OH | 308 | 254 | 189 | 165 |
| 58. | Irak | OH | 397 | 283 | 220 | 201 |
| 59. | Yordania | OH | 365 | 254 | 197 | 916 |
| 60. | Kuwait | OH | 406 | 283 | 257 | 256 |
| 61. | Libanon | OH | 357 | 267 | 207 | 186 |
| 62. | Qatar | OH | 386 | 276 | 215 | 196 |
| 63. | Arab Suriah | OH | 358 | 257 | 200 | 196 |
| 64. | Turki | OH | 365 | 270 | 210 | 188 |
| 65. | Pst. Arab Emirat | OH | 459 | 323 | 302 | 301 |
| 66. | Yaman | OH | 353 | 241 | 197 | 196 |
| 67. | Saudi Arabia | OH | 391 | 276 | 215 | 201 |
| 68. | Kesultanan Oman | OH | 359 | 254 | 197 | 185 |
| | | | | | | |
| | XIII. ASIA TIMUR | | | | | |
| 69. | Rep. Rakyat Cina | OH | 378 | 238 | 207 | 206 |
| 70. | Hongkong | OH | 472 | 320 | 287 | 286 |
| 71. | Jepang | OH | 519 | 303 | 262 | 261 |
| 72. | Korea Selatan | OH | 421 | 326 | 297 | 296 |
| 73. | Korea Utara | OH | 395 | 238 | 207 | 206 |
| | | | | | | |
| | XIV. ASIA SELATAN | | | | | |
| 74. | Afganistan | OH | 385 | 226 | 173 | 172 |
| 75. | Bangladesh | OH | 339 | 196 | 167 | 166 |
| 76. | India | OH | 352 | 263 | 242 | 241 |
| 77. | Pakistan | OH | 343 | 203 | 182 | 181 |
| 78. | Srilangka | OH | 348 | 201 | 167 | 166 |
| 79. | Iran | OH | 351 | 260 | 202 | 181 |
| 80. | Uzbekistan | OH | 392 | 352 | 287 | 254 |
| 81. | Kazakhstan | OH | 456 | 420 | 334 | 333 |
| | | | | | | |
| | XVI. ASIA TENGGERA | | | | | |
| 82. | Philipina | OH | 412 | 278 | 222 | 221 |
| 83. | Singapura | OH | 424 | 290 | 224 | 221 |
| 84. | Malaysia | OH | 381 | 253 | 212 | 211 |
| 85. | Thailand | OH | 392 | 275 | 211 | 201 |

| NO. | NEGARA | SATUAN | GOLONGAN | | | |
|-----|---------------------------|--------|----------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| | | | Bupati/ Wakil Bupati | DPRD/ Eselon II | Eselon III | Eselon IV/ Staf |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 86. | Myanmar | OH | 368 | 250 | 197 | 196 |
| 87. | Laos | OH | 380 | 262 | 202 | 196 |
| 88. | Vietnam | OH | 383 | 265 | 204 | 196 |
| 89. | Brunai Darussalam | OH | 374 | 256 | 197 | 196 |
| 90. | Kamboja | OH | 296 | 223 | 197 | 196 |
| 91. | Timor Leste | OH | 392 | 352 | 229 | 196 |
| e | | | | | | |
| | XVII. ASIA PASIFIK | | | | | |
| 92. | Australia | OH | 439 | 403 | 272 | 271 |
| 93. | Selandia Baru | OH | 392 | 246 | 222 | 221 |
| 94. | Kaledonia Baru | OH | 425 | 387 | 276 | 224 |
| 95. | Papua Nugini | OH | 385 | 353 | 237 | 192 |
| 96. | Fiji | OH | 363 | 329 | 221 | 179 |

BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID


Lampiran II : Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor : 11 Tahun 2020
Tentang : Perjalanan Dinas Dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

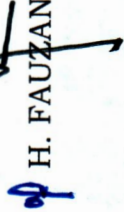
BIAYA PERJALANAN DINAS DI DALAM/KE LUAR DAERAH

| No. | Daerah | Bupati/ Wakil Bupati | Pimpinan DPRD | Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah | Pejabat Eselon II | Pejabat Eselon III/ Gol.IV | Pejabat Eselon IV/Eselon V/Gol.III dan Tokoh Masyarakat | PNS Gol.II/ Gol.I/PTT dan Anggota Masyarakat | Ket. |
|-----|------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|---|--|------|
| I. | DI IBUKOTA RI DAN PROVINSI LAINNYA | | | | | | | | |
| a | Penginapan | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,250,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 900,000 | 850,000 | |
| b | Uang Harian | 2,050,000 | 2,050,000 | 1,850,000 | 1,250,000 | 1,050,000 | 900,000 | 700,000 | |
| | - Uang Makan | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 200,000 | |
| | - Uang saku | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,250,000 | 650,000 | 450,000 | 400,000 | 300,000 | |
| | - Uang Transport Setempat | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| c | Uang Representasi | 1,000,000 | 1,000,000 | 950,000 | 900,000 | - | - | - | |
| d | Taxi Bandara | 950,000 | 950,000 | 850,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | |
| e | Sewa Kendaraan Dalam Kota | 800,000 | - | - | - | - | - | - | |
| | JUMLAH | 7,300,000 | 6,000,000 | 4,900,000 | 4,000,000 | 2,800,000 | 2,550,000 | 2,300,000 | |
| II. | DI IBUKOTA SE-PULAU SUMBAWA | | | | | | | | |
| a | Penginapan | 1,000,000 | 1,000,000 | 750,000 | 650,000 | 600,000 | 550,000 | 450,000 | |
| b | Uang Harian | 650,000 | 650,000 | 600,000 | 550,000 | 550,000 | 450,000 | 350,000 | |
| | - Uang Makan | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| | - Uang saku | 350,000 | 350,000 | 300,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | |
| | - Uang Transport Setempat | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | |
| c | Uang Representasi | 350,000 | 350,000 | 300,000 | 200,000 | | | | |
| d | Taxi Bandara | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
| e | Sewa Kendaraan Dalam Kota | 400,000 | | | | | | | |
| | JUMLAH | 2,900,000 | 2,500,000 | 2,150,000 | 1,900,000 | 1,650,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | |

4

| No. | Daerah | Bupati/ Wakil Bupati | Pimpinan DPRD | Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah | Pejabat Eselon II | Pejabat Eselon III/ Gol.IV | Pejabat Eselon IV/ Eselon V/ Gol.III dan Tokoh Masyarakat | PNS Gol.II/ Gol.I/ PTT dan Anggota Masyarakat | Ket. |
|------|---|-------------------------|------------------|---|----------------------|----------------------------------|--|--|------|
| III. | DI IBUKOTA SE-PULAU LOMBOK DILUAR KABUPATEN LOMBOK BARAT | | | | | | | | |
| a | Penginapan | 800.000 | 800.000 | 750.000 | 700.000 | 650.000 | 500.000 | 450.000 | |
| b | Uang Harian | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | |
| c | Uang Representasi | 250.000 | 250.000 | 150.000 | 100.000 | - | - | - | |
| | JUMLAH | 1.550.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 850.000 | 850.000 | 700.000 | 600.000 | |
| IV. | PERJALANAN DINAS SE KABUPATEN LOMBOK BARAT | | | | | | | | |
| a | Perjalanan Dinas Diatas 8 Jam | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 200.000 | |
| b | Perjalanan Dinas Dibawah 8 Jam | 200.000 | 200.000 | 175.000 | 170.000 | 160.000 | 155.000 | 150.000 | |
| c | Transport Penyeberangan Ke Gili | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| d | Biaya Penginapan Di Gili | 650.000 | 600.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 | |
| | JUMLAH | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.325.000 | 1.220.000 | 1.110.000 | 1.005.000 | 900.000 | |
| V. | PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DAN MONITORING BAGI PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DAN ATAU PEGAWAI NEGERI SIPIL/APIP | | | | | | | | |
| | Uang saku | - | - | - | 250.000 | 200.000 | 150.000 | 120.000 | |
| | JUMLAH | - | - | - | 250.000 | 200.000 | 150.000 | 120.000 | |

BUPATI LOMBOK BARAT, 

 H. FAUZAN KHALID


Lampiran VIII : Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor : 11 Tahun 2020
Tentang : Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

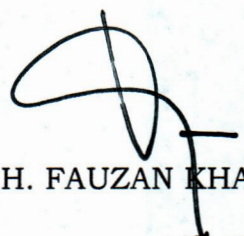
TUNJANGAN PERJALANAN TETAP

Tunjangan Perjalanan Tetap diberikan kepada Pegawai yang wajib melakukan Perjalanan Dinas setiap bulannya di dalam Daerah Jabatan tertentu yang bersifat tetap.

Kepada Pegawai yang dimaksud diberikan tunjangan perjalanan tetap :

- a. Untuk Golongan IV sebesar..... Rp. 200.000,- / bulan
- b. Untuk Golongan III sebesar..... Rp. 150.000,- / bulan
- c. Untuk Golongan II sebesar Rp. 100.000,- / bulan
- d. Untuk Golongan I sebesar Rp. 75.000,- / bulan

BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID

Lampiran IX : Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor : 11 Tahun 2020
Tentang : Perjalanan Dinas dan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

CONTOH SURAT DAFTAR PERNYATAAN PENGELUARAN

DAFTAR PERNYATAAN PENGELUARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal , dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|--------------------|--------|
| 1 | Uang harian | Rp. |
| 2. | Taxi Bandara | Rp. |
| 3. | Uang Representatif | Rp. |
| | Jumlah | Rp. |

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui,

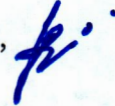
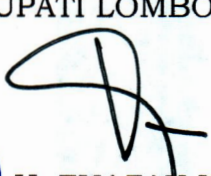
Pengguna Anggaran,

Gerung,.....

Pelaksana SPD,

NIP.

NIP.

BUPATI LOMBOK BARAT, 

H. FUAZAN KHALID